Analisis Yuridis Pemeriksaan Saksi di Persidangan Secara Virtual Online di Masa Pandemi Covid 19

Oleh: Radika Tiara Faranisha

Pembimbing 1: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.

Pembimbing 2: Elmayanti, S.H., M.H.

**Alamat: Jl. Nurul Amal Gg. Daya No. 01, Kecamatan Marpoyan Damai Kota
Pekanbaru Riau**

Email/Telepon: radikatiarafaranisha53@gmail.com / +62 896-3621-1394

Abstract

The growth of communication and information technology continues to develop, especially during this Covid 19 pandemic, during a pandemic like today, many things are carried out virtually online, not least in terms of evidence in court. One of the policies due to the Covid-19 pandemic is the implementation of social distancing, so that generally trials conducted conventionally turn into virtual online (teleconference), so that in this case the examination of witnesses is also carried out (teleconference). The process of examining witnesses by teleconference raises various pros and cons in its implementation. The debate that has arisen is that teleconference is against the Criminal Procedure Code. The Criminal Procedure Code which is the legal umbrella as a provision that enforces proceedings in Indonesian courts has not explicitly regulated electronic evidence, in this case teleconferences, so that there is no legal certainty compared to statements or explanations given directly before the trial by witnesses. Article 185 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code also confirms that "Witness testimony as evidence is what he stated before the trial". The main problems in this study are: How is the validity of online virtual witness evidence in the examination of criminal cases during the covid 19 pandemic; How to reform criminal law related to evidence of witness testimony virtually online (teleconference).

This type of research is a normative juridical law research conducted by examining library materials or secondary data. The data sources used are secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by library research or library research. Data analysis used qualitative methods which were carried out descriptively.

The results of this study are the validity of online virtual witness evidence in the examination of criminal cases during the covid 19 pandemic. The obstacles in this implementation are: Contrary to Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, where there are no special rules which regulates the examination of witnesses virtually online (Teleconference). Efforts that can be made to overcome these obstacles are: carrying out legal reforms related to the Criminal Procedure Code, it is necessary to carry out harmonization and synchronization in the Criminal Procedure Code (KUHAP). With the birth of the new KUHAP, which in this case is ratified and enforced as positive law as the basis for implementing procedural law in Indonesia, it is hoped that it can bring useful changes in the context of law enforcement with the aim of realizing justice for the entire community.

Keywords: Witness Examination - Virtual Online (Teleconference) - Covid 19 Pandemic.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan teknologi komunikasi serta informasi terus berkembang terlebih dimasa pandemi Covid 19, di kala pandemi seperti sekarang ini, banyak hal-hal yang dilaksanakan secara virtual *online*, tidak lain halnya juga dalam perihal pembuktian di persidangan.

Salah satu kebijakan akibat pandemi Covid 19 adalah diberlakukannya *social distancing*, sehingga pelaksanaan kegiatan di pengadilan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan tidak dimungkinkan institusi pengadilan untuk mengadakan persidangan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga yang umumnya persidangan dilakukan secara konvensional berubah menjadi virtual *online (teleconference)*, sehingga dalam hal ini pemeriksaan saksi pun dilakukan secara *(teleconference)*.¹

Bersumber pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2020 bertepatan pada tanggal 23 Maret serta Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 bertepatan pada tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Pidana Secara *Teleconference*. Pelaksanaan sidang secara *teleconference* ini dilaksanakan mengacu pada instruksi Jaksa Agung melalui Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-049/A/Suja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Penerapan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Menghindari Penyebaran Covid-19 (berikutnya disingkat SEJA Nomor B-049/A/Suja/03/2020).²

Perjanjian tersebut sebelumnya telah diberlakukan semenjak dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2020, dimana menghendaki pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara *online*, akan tetapi ditegaskan kembali dalam SEMA No. 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam Tatanan Normal Baru.³ Dimana dalam hal ini terdapat pertentangan antara SEMA yang menghendaki pelaksanaan persidangan secara *online* dengan KUHAP yang belum mengatur mengenai persidangan secara *online*.

Salah satu contoh kasus pemeriksaan saksi yang dilakukan secara virtual *online (teleconference)* dikala Pandemi Covid 19 ini adalah kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor perkara 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr dengan terdakwa M. YASIRWAN Bin M. Yusuf. Dimana pada saat itu saya melihat sendiri bagaimana proses pemeriksaan saksi secara virtual *online (teleconference)* ini, saksi tidak dihadirkan ke dalam ruang persidangan dan saksi juga tidak memberikan keterangannya di dalam ruang persidangan, tetapi kita dapat melihat saksi memberikan keterangannya melalui layar lebar, atau pemeriksaan saksi ini juga disebut dengan pemeriksaan saksi secara virtual *online (teleconference)*.

Kesaksian yang diinformasikan lewat *teleconference* merupakan langkah baru dalam dunia hukum yang disebabkan pandemi Covid 19 ini, khususnya dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Akan tetapi di dalam KUHAP pemeriksaan saksi virtual *online (teleconference)*

¹ Nur Akmal Razaq, "Legalitas Persidangan Daring di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum pidana", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 1, Nomor 6, 2020, hlm. 1227.

² Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S.Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan

Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, 2020, hlm.292.

³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020.

belum diatur, apabila berpedoman pada pasal 160 ayat (1) huruf a serta pasal 167 ayat (1) terlihat bahwa kehadiran saksi “dituntut” secara fisik di ruang sidang sehingga pemakaian *teleconference* bertentangan dengan ketentuan KUHAP.

Pembaharuan hukum juga diperlukan dalam permasalahan ini, dikarenakan peraturan mengenai alat bukti elektronik yang minim, membuktikan bahwa ketentuan normatif di Indonesia sampai saat ini masih belum bisa menyesuaikan dengan perkembangan di era saat ini sehingga dalam praktiknya sendiri para praktisi hukum beracara di pengadilan menimbulkan pro kontra dalam memberlakukan *teleconference* sehingga implementasi pembuktian keterangan saksi secara elektronik dimuka persidangan menjadi kurang optimal.

Proses pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini menimbulkan bermacam pro dan kontra dalam penerapannya, sebab *teleconference* berlawanan dengan KUHAP. KUHAP yang menjadi payung hukum selaku ketentuan yang memberlakukan proses beracara di pengadilan Indonesia belum secara tegas mengatur alat bukti elektronik, dalam perihal ini *teleconference*, sehingga belum terdapat kepastian hukumnya dibanding dengan keterangan atau penjelasan yang diberikan secara langsung di muka persidangan oleh saksi. Pasal 185 ayat (1) KUHAP juga menegaskan bahwa “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang ia nyatakan dimuka persidangan”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis kemudian ingin mengangkat sebuah penelitian berjudul “**Analisis Yuridis Pemeriksaan Saksi di Persidangan Secara Virtual Online di Masa Pandemi Covid 19**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keabsahan pembuktian saksi secara virtual *online* dalam

pemeriksaan perkara pidana di masa pandemi covid 19?

2. Bagaimanakah pembaharuan hukum pidana terkait alat bukti keterangan saksi secara virtual *online* (*teleconference*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui keabsahan pembuktian saksi secara virtual *online* dalam pemeriksaan perkara pidana di masa pandemi covid 19.
- b. Untuk mengetahui pembaharuan hukum pidana terkait alat bukti keterangan saksi secara virtual *online* (*teleconference*).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau dan penulis juga dapat memperoleh wawasan baru dan juga sekaligus sebagai sarana dalam melihat perkembangan hukum acara pidana, serta pembaharuan hukum pidana, khususnya tentang pemeriksaan saksi secara virtual *online* di sidang pengadilan.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, sebagai bahan pertimbangan yang dapat memberkan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik khususnya dalam bidang hukum sehingga hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi tambahan literatur di perpustakaan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, dan masyarakat dalam memahami pemeriksaan saksi secara virtual *online* di sidang pengadilan selama pandemi covid 19.

D. Kerangka Teori

Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi, proposisi untuk

menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan metode merumuskan hubungan antar konsep.⁴ Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pembuktian dan Teori Pembaharuan Hukum

E. Kerangka Konseptual

1. Menurut KBBI, analisis merupakan penguraian suatu pokok dari berbagai macam bagian, penelaahan bagian itu sendiri dan juga hubungan antar bagian demi mendapatkan penafsiran yang tepat dan pemahaman secara keseluruhan.⁵
2. Menurut kamus hukum, yuridis berarti menurut hukum ataupun secara hukum.⁶
3. Pemeriksaan ialah suatu tahapan di persidangan yang dilakukan oleh panel hakim untuk memeriksa pokok permasalahan perkara.⁷
4. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan ataupun penjelasan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan serta pengetahuannya itu.⁸
5. Menurut KBBI, persidangan artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu.⁹ Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh mahkamah, baik itu sidang panel maupun sidang pleno yang dilakukan guna untuk memeriksa, mengadili, dan

memutus permohonan yang diajukan kepada mahkamah konstitusi.¹⁰

6. Menurut KBBI, virtual berarti secara nyata.¹¹
7. Menurut Dedik Kurniawan, *online* merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan secara *online*.
8. Menurut KBBI, pandemi merupakan wabah yang berjangkit serempak dimana-mana ataupun meliputi geografis yang luas.¹²
9. Covid 19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yaitu Sars-Co V-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok bertepatan pada tanggal 31 Desember 2019.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁴

Jenis penelitian ini merupakan penelitian terhadap sistematika hukum.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dimana data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.¹⁵

⁴ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 19.

⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (diakses pada 17 Juli 2021)

⁶ <https://kamushukum.web.id>, (diakses tanggal 17 Juli 2021)

⁷ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PemeriksaanPerkara&menu=4>, (diakses tanggal 17 Juli 2021)

⁸ Pasal 1 angka 26 KUHAP

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (diakses pada 17 Juli 2021)

¹⁰ Pasal 1 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (diakses pada 17 Juli 2021)

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (diakses pada 17 Juli 2021)

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, (diakses pada 17 Juli 2021)

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm. 30.

Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum (Penelitian Kepustakaan atau *library research*). Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan untuk dikaji secara komprehensif.

4. Analisa Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dan membahas permasalahannya menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan kebijakan ataupun pembaharuan hukum pidana sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana yang diharapkan dalam undang-undang yang akan datang.¹⁶

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu perbuatan membuktikan. Membuktikan disini berarti memberikan ataupun memperlihatkan alat bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.¹⁷

Dalam kamus hukum pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim, yang memeriksa suatu perkara guna

memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa ataupun kejadian yang dikemukakan.¹⁸

2. Macam-Macam Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan pengaturan mengenai macam-macam alat bukti yang boleh digunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara bagaimana alat bukti itu dapat dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.¹⁹

a. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*);

Pembuktian menurut undang-undang secara positif atau *conviction-in time*.²⁰ Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.²¹

b. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction-in Time*);

Sistem pembuktian *conviction-in time* memutuskan salah tidaknya seseorang terdakwa ditetapkan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang memastikan keterbuktian kesalahan terdakwa.²²

c. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim atas Alasan yang Jelas dan Rasional (*Conviction-Raisonee*);

Dalam sistem ini dapat juga dikatakan keyakinan hakim senantiasa memegang peranan penting. Akan tetapi, faktor keyakinan hakim dibatasi.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*).

¹⁶ Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm. 45.

¹⁷ Eddy, O.S, Hiariej, *op.cit.*, hlm 3

¹⁸ <https://kamushukum.web.id>, diakses tanggal 29 November 2021.

¹⁹ Alfitra, *op.cit.*, hlm. 28.

²⁰ *Ibid*, hlm. 278

²¹ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 251.

²² Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 122.

Pembuktian ini merupakan pembuktian yang menggunakan alat bukti yang dicantumkan dalam undang-undang dan juga menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang.

B. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Menurut kamus hukum alat bukti merupakan alat yang sudah ditentukan didalam hukum formal, yang dapat digunakan sebagai pembuktian didalam persidangan, dalam hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.²³ Di dalam hukum pidana mengenai alat bukti secara formal diatur dalam pasal 184 KUHAP.

2. Macam-Macam Alat Bukti

Beberapa alat bukti yang sah menurut undang-undang yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) yakni:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berbentuk keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.²⁴

b. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP keterangan ahli adalah: “Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan

untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

c. Surat

Mengenai surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, surat yang dikatakan sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan ataupun yang dikuatkan dengan sumpah.

d. Petunjuk

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur didalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP.

e. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi: Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri ataupun ia alami sendiri.

3. Alat Bukti Elektronik

Informasi yang disimpan secara elektronik, termasuk rekaman, tidak dapat diajukan sebagai alat bukti berdasarkan KUHAP.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut (Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008).²⁵

- a. dapat memperlihatkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, serta keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

²³ <https://kamushukum.web.id>, diakses tanggal 29 November 2021.

²⁴ Eddy O.S Hiariej, *op.cit.*, hlm. 57.

²⁵ Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Psl. Pasal 5 Ayat (3) Jo. Pasal 6

- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur ataupun petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, ataupun simbol yang dapat dimengerti oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- e. mempunyai mekanisme yang berkelanjutan untuk melindungi kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur ataupun petunjuk.

C. Tinjauan Umum Mengenai Keterangan Saksi

1. Pengertian Keterangan Saksi

Dalam kamus hukum, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berbentuk keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri serta ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.²⁶

2. Syarat Sahnya Keterangan Saksi

- a. Syarat formil
Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak di sumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan kesaksian yang sah lainnya.
- b. Syarat materil
Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap secara sah sebagai alat pembuktian, sebab tidak memenuhi syarat materil.

3. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Pentingnya keterangan saksi terlihat di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terurai di dalam pasal 184 KUHP dimana menampilkan bahwa keterangan

saksi menempati urutan awal di antara daftar alat bukti yang sah lainnya. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi dan hampir seluruh pembuktian perkara pidana senantiasa bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.

D. Tinjauan Umum Mengenai Teleconference

1. Pengertian Teleconference

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *teleconference* atau telekonferensi adalah obrolan langsung jarak jauh dengan menggunakan media seperti televisi ataupun telepon.²⁷

2. Fungsi Teleconference

Dengan *teleconference* kita dapat berkomunikasi dengan seseorang yang berada di tempat yang berbeda, melakukan pertemuan tanpa harus datang ke satu tempat yang sama. Ini dapat menghemat waktu dan juga pengeluaran untuk biaya perjalanan.

3. Peralatan Teleconference

- a. *Device* atau Perangkat
- b. *Perangkat* lunak.
- c. *Koneksi* Internet.
- d. *Peralatan* pendukung audio.
- e. *Peralatan* pendukung video.

4. Manfaat Penggunaan Teleconference

- a. Menghemat waktu dengan mengurangi waktu perjalanan
- b. Menurunkan biaya
- c. Lebih cepat dan lebih baik dalam mengambil keputusan
- d. Informasi pengetahuan dapat diperoleh lebih cepat
- e. Meningkatkan produktivitas²⁸

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Pembuktian Saksi Secara Virtual Online Dalam

²⁶ <https://kamushukum.web.id>, diakses tanggal 29 November 2021.

²⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 10 Desember 2021.

²⁸ <http://in.vmeetsolutions.com/apa-itu-video-conference>, diakses 10 Desember 2021.

Pemeriksaan Perkara Pidana Di Masa Pandemi Covid 19

Sistem pembuktian merupakan suatu pengaturan tentang berbagai macam alat bukti yang dapat digunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara bagaimana alat-alat bukti itu dapat digunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.²⁹

Jika dikaitkan dengan teori pembuktian terdapat beberapa sistem pembuktian yaitu pembuktian secara positif (alat bukti ditetapkan oleh undang-undang), sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka (*conviction-in time*), sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang jelas dan rasional (*conviction-raisonnee*), dan sistem pembuktian secara negatif. Jadi jika merujuk pada Pasal 183 KUHAP, maka KUHAP menganut sistem pembuktian secara negatif.

Proses Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian terpenting dalam persidangan, maka ialah suatu kewajiban kepada penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya, begitu banyak hambatan yang dialami oleh penuntut umum dalam menghadirkan saksi seperti halnya terdapat ancaman dari pihak lain terhadap keberadaan saksi di persidangan ataupun saksi sedang dengan kondisi yang secara undang-undang disahkan tidak dapat hadir didalam sidang, dan juga seperti halnya di masa pandemi sekarang ini, maka dari itu dengan adanya kemajuan teknologi *teleconference* dalam memberikan keterangan saksi dapat membantu penuntut umum maupun hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

Penggunaan *teleconference* dalam pembuktian bertujuan untuk mendapatkan suatu kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana. Memang hal ini

belum diatur secara tegas di dalam KUHAP, namun demi guna mencapai suatu kebenaran materil sebagaimana diamanatkan tujuan hukum acara pidana maka dapat dibenarkan serta harus didukung dengan keyakinan hakim.

Kebijakan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik diperkuat dengan terdapatnya sebuah *MoU* (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasarakatan disahkan pada tanggal 13 April 2020 No. 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05. Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. *MoU* tersebut terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan sepanjang masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan hingga berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia.

Dalam *MoU* itu ditetapkan salah satunya kesepakatan untuk melaksanakan persidangan perkara pidana secara online. Lebih jelasnya hal tersebut sesuai dengan instruksi Jaksa Agung yaitu untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid 19 agar perkara pidana disidangkan secara *online*. Instruksi tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19.

Sebagai tindak lanjut dari *MoU* tersebut Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan

²⁹ Alfitra, *loc.cit.* Hlm. 28.

sidang pidana baik perkara pidana dalam ruang lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara *online* (*teleconference*).

Upaya melaksanakan persidangan *online* dimasa pandemi Covid-19 dianggap sebagai langkah progresif dalam memecahkan permasalahan akibat penyebaran Covid-19. Hal ini perlu dilakukan, karena apabila persidangan tetap dilaksanakan secara langsung seperti biasa, maka akan beresiko terkena virus Covid-19, dan apabila persidangan ditunda, maka akan mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib serta status yang belum jelas dari para hakim.

Namun bukan berarti persidangan *online* ini tidak mempunyai masalah ataupun hambatan. Pertama persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *online* ini tidak terdapat aturannya dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga akan memunculkan disharmonisasi hukum dan juga pada praktiknya akan terkesan dipaksakan atau tergesa-gesa serta mengurangi bahkan mengesampingkan ketentuan hukum acara pidana tersebut.

Penerapan persidangan *online* ini dapat mengganggu prinsip *fair trial* (peradilan jujur dan adil), jika infrastruktur untuk menunjang peradilan *online* kurang memadai dan juga berpotensi mengurangi keabsahan dalam proses pembuktian. Tidak hanya itu, antara hakim, jaksa, terdakwa, penasihat hukum dan saksi tidak dalam satu ruangan yang sama.

Ditinjau dari Perspektif Hukum progresif yang mengutamakan keadilan yang berkembang dan tumbuh di masyarakat, maka penggunaan *teleconference* didalam persidangan merupakan sesuatu yang sah, sepanjang berguna untuk menegakkan hukum dan keadilan yang restoratif bukan keadilan prosedural semata. Esensi terpenting

dalam persidangan khususnya dalam perkara pidana adalah keahlian jaksa penuntut umum dalam membuktikan suatu perbuatan tindak pidana melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk maupun keterangan terdakwa.

Pada dasarnya pertentangan yang senantiasa mencuat yaitu berkaitan dengan pemeriksaan saksi melalui *teleconference* yang tidak diatur dalam KUHAP, namun apabila mencermati prinsip dalam hukum acara pidana di Indonesia dan asas trilogi peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pelaksanaan pemeriksaan saksi melalui media *teleconference* ini dapat memenuhi prinsip tersebut.

Secara prinsip hukum, berikut beberapa perbandingan pemeriksaan saksi dengan menggunakan *video conference* dengan pemeriksaan saksi secara langsung di pengadilan. Berikut perbandingan antara keduanya:

1. Pengucapan sumpah atau janji.
Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), saat sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah ataupun janji. prinsip pengucapan sumpah dalam pemeriksaan saksi dengan media *teleconference* sama dengan pemeriksaan saksi di persidangan yang di hadapkan secara biasa.
2. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.
Secara visual saksi senantiasa hadir pada persidangan dan berhadapan dengan hakim, penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa.
3. Penilaian kebenaran keterangan saksi.
4. Untuk menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapatnya kaitan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain sehingga keterangan tersebut dapat membentuk keterangan yang membenarkan

adanya suatu peristiwa atau kondisi tertentu.

Mengacu pada ketentuan Putusan MA RI No. 661K/Pid/1988 tanggal 9 Juli 1991 yang pada dasarnya menegaskan bahwa “Saksi yang memberikan keterangannya ditahap penyidikan dan sudah disumpah, akan tetapi karena suatu halangan yang sah ia tidak bisa hadir pada persidangan dan keterangannya tersebut dibacakan maka nilai keterangannya itu disamakan dengan keterangan Saksi yang di sumpah di persidangan. Dalam hal ini, hukum pembuktian sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan perkembangan. Sehingga mengenai alat bukti elektronik diatur didalam “Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

“Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa “Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Bahwasanya pasal 5 ayat (1) tersebut merupakan suatu perluasan dalam hukum acara yang menjadi terbosos hukum dari pengertian alat bukti yang sah yang berlaku di Indonesia.

Dalam Perma No. 4 Tahun 2020 memang kekuatan pembuktian ataupun keabsahan hasil pemeriksaan saksi yang diperiksa melalui *teleconference* adalah sah, namun dalam KUHAP belum mengatur mengenai pemeriksaan saksi melalui *teleconference*. Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Kemudian sebelum adanya Perma dan sebelum adanya pandemi covid 19 memang *teleconference* pernah dilakukan pada proses pemeriksaan saksi pada BJ Habibie tahun 2002 lalu, tetapi dikala itu

penggunaan *teleconference* dilakukan karena kendala jarak saksi yang berada di luar negeri. Proses pemeriksaan saksi yang dilakukan kepada BJ Habibie tersebut berdasarkan izin dari hakim dan MA karena pada saat itu belum ada pengaturan yang tegas mengenai pemeriksaan saksi yang dilakukan secara *teleconference*.³⁰

Akan tetapi PERMA No. 4 Tahun 2020 tidak menjelaskan mengenai wewenang pengawasan pemeriksaan saksi secara elektronik karena bisa berpotensi saksi memberikan keterangan dengan tidak bebas atau melanggar ketentuan pemeriksaan saksi yang telah diatur KUHAP, karena ketidakjelasan pengaturan pengawasan pemeriksaan saksi secara elektronik membuat keaburan hukum yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum.³¹

Pada prakteknya memang Perma sendiri tidak boleh menentang KUHAP, namun kembali lagi karena masa pandemi covid 19 dan adanya asas *salus populi suprema lex esto* yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, maka adagium *salus populi suprema lex esto* bermakna apabila dibawah ancaman situasi dan kondisi darurat maka keselamatan rakyat harus menjadi tujuan paling utama, termasuk jika harus mengenyampingkan aturan hukum, maka dari itu hukum yang akan diterapkan harus benar-benar melindungi rakyat.

Kemudian dalam Perma No. 4 Tahun 2020 kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* sama halnya seperti kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dinyatakan langsung di persidangan. Perbedaannya hanya terletak pada posisi saksi yang tidak berada di ruang persidangan. Sehingga

³⁰<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c15644/surat-edara-ma/>, diakses pada tanggal 9 Januari 2021.

³¹ Lina Majdina, Pengawasan Pemeriksaan Saksi Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik, *Badamai Law Journal*, Vol. 5, Issues 1, Maret 2020, hlm.96.

pemeriksaan saksi melalui teleconference dapat dikatakan hanya merupakan sarana untuk tetap menghadirkan saksi secara langsung di persidangan namun melalui layar monitor.

B. Pembaharuan Hukum Pidana Terkait Alat Bukti Keterangan Saksi Secara Virtual Online (*Teleconference*)

Peraturan mengenai alat bukti keterangan saksi secara virtual *online* (*teleconference*) yang tidak diatur di dalam KUHAP, hal itu membuktikan bahwa ketentuan normatif di Indonesia sampai saat ini masih belum dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini sehingga dalam praktiknya sendiri pada saat para praktisi hukum beracara di pengadilan menimbulkan pro kontra terkait pemeriksaan saksi secara *teleconference* sehingga implementasi pembuktian elektronik di muka persidangan menjadi kurang optimal.

Jika dikaitkan dengan teori pembaharuan hukum, Muladi menyebut setidaknya terdapat pokok pikiran atau rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional yaitu salah satunya, pembaharuan hukum pidana harus senantiasa tanggap dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kenaikan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum termasuk pembaharuan hukum pidana harus senantiasa tanggap dengan perkembangan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat.

Masuknya *teleconference* dalam persidangan perkara pidana di Indonesia, menunjukkan bahwa hukum tidak statis, melainkan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Kenyataan ini, dikuatkan oleh Sunaryati Hartono, bahwa pembangunan dalam bidang hukum meliputi:³²

1. Menyempurnakan (membuat sesuatu lebih baik);
2. Mengubah agar menjadi lebih baik dan modern;
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada; atau
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak sesuai dengan sistem baru.

Pembaharuan terhadap hukum nasional Indonesia dibutuhkan dengan memperhatikan unsur-unsur perkembangan yang ada di masyarakat agar peraturan perundang-undangan dapat mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, regulasi keterangan saksi secara *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana di masa yang akan datang adalah melalui kebijakan hukum secara formatif. Kebijakan hukum yang sempurna adalah dalam bentuk undang-undang. Oleh sebab itu, penting untuk dilakukannya amandemen terhadap KUHAP sebagai landasan hukum beracara di pengadilan. Dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP, keterangan saksi secara *teleconference* diatur dalam Pasal 180 ayat 2 RUU KUHAP yang mengatakan bahwa dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, keterangan saksi dapat dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi *audio-visual* dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum. Namun selama RUU KUHAP tersebut belum disahkan, maka untuk mengantisipasinya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) selaku payung hukum bagi pelaksanaan keterangan saksi melalui *teleconference*.

³² Muslim Mamulai, Hakikat Pembuktian Melalui Media Elektronik Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana, *Mahasiswa Program*

Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar, Vol. 19 No. 1 Mei 2017, hlm. 13.

Hal ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya pro dan kontra terhadap penerapan kesaksian melalui *teleconference*. Dengan adanya perma ini diharapkan bisa mengisi kekosongan hukum sehingga legalitas kesaksian melalui *teleconference* menjadi lebih jelas.³³

Satjipto Rahardjo berpendapat hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya.³⁴ Oleh karena itu, apabila terdapat suatu permasalahan dengan dan dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki dan ditinjau, bukan memasukkan manusia dengan memaksanya kedalam skema hukum tersebut.³⁵ Ironisnya, seiring perkembangan zaman dan semakin pesatnya kemajuan teknologi membuat KUHAP akan tertinggal dari perkembangan zaman.³⁶ Seperti halnya pemanfaatan *teleconference* yang digunakan saksi dalam memberikan keterangannya di persidangan yang dapat menimbulkan multitafsir dan juga menuai pro dan kontra disebabkan KUHAP yang belum mengatur mengenai pemeriksaan saksi melalui *teleconference*.

Keterangan yang diberikan saksi secara *teleconference* sebagai alat bukti yang diajukan di muka persidangan ialah suatu perwujudan dari adanya wewenang Majelis Hakim, yang berdasarkan penetapannya memperbolehkan untuk dilaksanakannya *teleconference*. Kewajiban hakim sebagaimana tertuang dalam “Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” yaitu senantiasa menggali dan melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang berkembang, berkaitan dengan kemajuan

teknologi yang mempengaruhi dunia hukum, telah terimplementasi dengan memperbolehkan pemeriksaan saksi yang dilakukan secara *teleconference* di muka persidangan sebagai bentuk pemahaman dari para hakim dalam melakukan kewajibannya yang bersumber pada penetapan pelaksanaan oleh hakim. Bukanlah suatu pelanggaran hukum apabila para praktisi hukum dalam pembuktian menggunakan *teleconference*.

Menurut sistem hukum Indonesia, pemeriksaan saksi secara *teleconference* belum diatur secara jelas dan tegas di dalam KUHAP. Dalam praktiknya, aturan mengenai *teleconference* diatur secara samar pada undang-undang secara *lex specialist* yang menegaskan mengenai perluasan alat bukti, sementara itu aturan mengenai pemeriksaan saksi secara *teleconference* secara jelas tercantum pada yurisprudensi. Yurisprudensi yang dianut Indonesia dapat digolongkan sebagai “*persuasive precedent*”. Akan tetapi, sifatnya tidak mengikat yang berarti yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) tidak wajib diikuti oleh pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri di Indonesia, melainkan hanya disarankan untuk diikuti.

Dengan demikian, pemberian keterangan oleh saksi secara *teleconference* ini tidak secara impulsif dapat di implementasikan sebagai suatu aturan yang dapat langsung diterapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu upaya untuk melakukan amandemen pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pembaharuan hukum agar dapat berlaku

³³ Ruth Marina Damayanti Siregar, Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconferences Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana, *Jurisprudence*, Vol. 5 No. 1, 2015, hlm. 30-31.

³⁴Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 5.

³⁵*Ibid*, hlm. 5.

³⁶Dian Erdianto, Eko Sopyono, Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media *Teleconference* Di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 72.

sesuai dengan perkembangan zaman, mengingat perkembangan serta kemajuan teknologi begitu pesat sehingga berakibat juga terhadap masyarakatnya yang ikut menjadi berkembang.

Merupakan hal penting untuk melakukan pembaharuan terhadap aturan yang menjadi dasar beracara di pengadilan, yaitu dalam Pasal 180 ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang menyatakan “dalam hal saksi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan disidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui media komunikasi *audio-visual* dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum.”³⁷ permasalahan sampai saat ini ialah RKUHAP belum juga disahkan. Maka dari itu Mahkamah Agung mengesahkan payung hukum terkait keberlakuan *teleconference* yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) untuk digunakan dalam pemeriksaan saksi.

Penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara *online* atau *teleconference* ditengah pandemi Covid-19 ini merupakan bentuk terobosan yang paling tepat yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, karena lambatnya pembaharuan hukum di Indonesia (*Expired Law*). Karena bagi Mahkamah Agung “*Justice Delayed, Justice Denied*” yang berarti “Keadilan yang Tertunda, Sama Seperti Tidak Ada Keadilan”. Namun dalam penerapan persidangan *online* pada perkara pidana ini sebagai bentuk pembaharuan hukum harus tetap dilakukan secara cermat dan teliti terutama menyangkut asas-asas sistem peradilan pidana yang lain.

Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di

Pengadilan Secara Elektronik dalam perspektif teori hukum progresif dan teori tujuan hukum sangat dibutuhkan karena dapat memberikan asas manfaat, kepastian hukum dan keadilan. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*).

Pembaharuan hukum terkait praktek pelaksanaan hukum acara nasional di Indonesia yang lebih responsif perlu dilakukan karena hukum acara pidana (KUHAP) saat ini dilihat tak lagi sesuai dengan ketatanegaraan serta perkembangan hukum yang ada di masyarakat, selain itu perkembangan teknologi secara global dapat berpengaruh terhadap makna dan keberadaan substansi KUHAP, sehingga perlu dilakukan pembaruan hukum acara pidana yang berorientasi kepastian hukum dan berdimensi keadilan yang juga dapat beradaptasi perkembangan zaman.

Oleh sebab itu, perlu dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Dengan lahirnya KUHAP yang baru, yang dalam hal ini disahkan dan diberlakukan sebagai hukum positif sebagai dasar pelaksana hukum acara di indonesia diharapkan dapat membawa perubahan yang bermanfaat dalam rangka penegakan hukum dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya pelaksanaan persidangan *online* dimasa pandemi Covid-19 merupakan langkah progresif dalam memecahkan permasalahan akibat penyebaran Covid-19, namun

³⁷ Pasal 180 ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

persidangan *online* dari sisi non teknis juga berpotensi memiliki gangguan seperti gangguan jaringan internet yang dapat menyebabkan tidak di dengar dan dilihatnya secara baik keterangan para pihak sehingga tidak tercapainya suatu kebenaran materiil. Namun apabila mencermati asas trilogi peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pelaksanaan pemeriksaan saksi melalui media *teleconference* ini dapat memenuhi prinsip tersebut, dan juga dengan adanya asas *salus populi suprema lex esto* yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, maka adagium *salus populi suprema lex esto* bermakna apabila dibawah ancaman situasi dan kondisi darurat maka keselamatan rakyat harus menjadi tujuan paling utama, termasuk jika harus mengenyampingkan aturan hukum.

2. Peraturan mengenai alat bukti keterangan saksi secara virtual *online (teleconference)* belum diatur dalam KUHAP membuktikan bahwa ketentuan normatif di Indonesia sampai saat ini masih belum dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga dalam praktiknya menimbulkan pro kontra. Dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP, keterangan saksi secara *teleconference* diatur dalam Pasal 180 ayat 2 RUU KUHAP yang menyatakan “bahwa dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, keterangan saksi dapat dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi *audio-visual* dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum.” Maka merupakan hal penting untuk melakukan pembaharuan hukum terhadap KUHAP. Dengan lahirnya KUHAP yang baru sebagai dasar pelaksana hukum acara di indonesia diharapkan

dapat membawa perubahan yang bermanfaat dalam rangka penegakan hukum serta dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

B. Saran

1. Pemeriksaan saksi secara virtual *online (teleconference)* ini dapat dilaksanakan, akan tetapi untuk perkara pidana yang pembuktiannya rumit serta membutuhkan alat bukti yang spesifik, penerapan sidang *online* tidak dapat dilakukan melainkan harus dilakukan secara langsung, contohnya seperti masalah korupsi yang memerlukan dokumen-dokumen penting seperti alat bukti surat harus diuji kebenarannya dan keabsahannya yang diperlihatkan secara langsung kepada para pihak untuk menilai kebenaran atas dokumen tersebut. Sehingga pelaksanaan persidangan untuk perkara diatas, tidak dapat dilaksanakan melalui sidang *online* sebab dapat menimbulkan manipulasi persidangan atau permainan perkara yang bisa mengaburkan atau mengubah fakta persidangan.
2. Perlu diadakan suatu rumusan mengenai langkah strategis dalam rangka mengoptimisasi sistem peradilan pidana secara elektronik di masa pandemi saat ini yaitu dengan mendorong pemerintah agar secepatnya melakukan pembaharuan hukum melalui perbaikan/revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai langkah awal. Dalam hal ini perlu dikukuhkan menjadi suatu norma baru sehingga dapat menjadi suatu penyelesaian permasalahan bukan hanya untuk kondisi seperti saat ini namun juga untuk kebijakan yang bersifat permanen pada lembaga peradilan sehingga tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Prespektif, Teoritis dan Praktik*. Bandung: PT Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- B. Jurnal**
- Erdianto, Dian dan Eko Sopyonyono. 2015. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia*. Jurnal Law Reform, 11(1), 65-73.
- Majdina, Lina. 2020. *Pengawasan Pemeriksaan Saksi Pada Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*. Badamai Law Journal, 5(1), 87-101.
- Mamulai, Muslim. 2017. *Hakikat Pembuktian Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, 19(1), 1-17.
- Nugroho, Dewi Rahmaningsih dan S.Suteki. 2020. *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 291-304.
- Razaq, Nur Akmal. 2020. *Legalitas Persidangan Daring di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum pidana*. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(6), 1227-1230.
- Siregar, Ruth Marina Damayanti. 2015. *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*. Jurisprudence, 5(1), 25-33.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Corona Virus Disease 2019.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam Tatanan Normal Baru.
- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference
- D. Website**
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PemeriksaanPerkara&menu=4,diakses> tanggal 17 Juli 2021.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 17 Juli 2021.
- <https://kamushukum.web.id>, diakses tanggal 17 Juli 2021.
- <http://in.vmeetsolutions.com/apa-itu-video-conference>, diakses 10 Desember 2021.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5644/surat-edara-ma/>, diakses pada tanggal 9 Januari 2021.